

IMPLIKASI HARTA BERSAMA TERHADAP NAFKAH KELUARGA

Elimartati

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar
Jl. Sudirman No.137 Kuburajo Lima Kaum Batusangkar
Elimartati@iainbatusangkar.ac.id



ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the provisions on the obligation of a living by a husband for his wife and children to be connected with joint property in A marriage. Collective assets in marriage initially originate from the customs ('urf) of a country that does not separate the property of husband and wife. Husband's income is mixed with the wife's income. The definition of shared property described in the law and Compilation of Islamic Law, brings an ambiguous understanding of the provisions of the husband's obligations regarding living which are explained in Law No. 1 of 1974 Article 34 and Article 80 of the Compilation of Islamic Law. There are no explanations for both of these living conditions, how to make a living for families who combine their wealth into joint property, and what is the difference with the family separating husband and wife property into personal property. The type of the research is a library research. The method used is normative qualitative. The data were collected from secondary data. The research is content analysis. The research findings explain that if the husband and the wife combine their wealth into joint assets willingly, the family needs must be taken from the joint property. This means that the husband cannot be sued again to provide for his wife and children. There should be an explanation in the implementation of the provisions of the obligation of the husband to provide for his wife and children as an implication of the provisions of joint property

Kata kunci: Implikasi, Harta Bersama, Nafkah Keluarga

PENDAHULUAN

Nafkah merupakan kebutuhan pokok untuk keberlangsungan kehidupan suatu keluarga. Kehidupan keluarga tidaklah nyaman apabila tidak terpenuhi nafkah. Hal yang telah disepakati oleh ulama kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi suami sebagai nafkah adalah pangan, sandang dan papan, berdasarkan dalil yang memberi petunjuk pada hukumnya jelas dan pasti. Tentang yang lain dari itu menjadi pembicaraan para ulama. Hukum membayar nafkah oleh suami kepada istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian, tempat tinggal adalah wajib. Para *fuqaha* sepakat akan wajibnya nafkah untuk istri baik muslim maupun kafir jika memang dinikahkan dengan akad yang sah. (Ibnu Rusd, tt: 41). Kewajiban nafkah suami untuk istri dan anaknya merupakan kewajiban *muhaddad* yakni kewajiban yang terukur bentuk, jenis dan kadarnya. (Wahbah Zuhaili, 1989: 788).

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia Pasal 34 menjelaskan bahwa "suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Apa yang diungkapkan undang-undang ini bila dilihat aturan tentang hak dan kewajiban suami- istri tentang nafkah dalam fikih klasik sudah terakomodir di dalamnya.

Begitu juga yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tidak membicarakan secara spesifik tentang nafkah. Namun hak dan kewajiban suami-istri di atur dalam KHI Pasal 77 sampai dengan pasal 82 telah menguatkan, menegaskan dan merinci apa yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan yang mengacu kepada kitab-kitab fikih yang pada umumnya mengikuti paham jumhur ulama khususnya *al-Syafi'iyah* (Amir Syarifuddin, 2006: 181).

Pengertian harta bersama yang dijelaskan dalam undang-undang dan KHI, membawa pemahaman yang rancu terhadap ketentuan kewajiban suami tentang nafkah yang di jelaskan dalam Pasal 34 ayat (1) (1) bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. dan KHI Ayat (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak serta biaya pendidikan.

Berdasarkan pengertian harta bersama diatur dalam undang-undang dan KHI, dapat dipahami bahwa suami tidak lagi memiliki secara pribadi harta yang diperoleh dari hasil usahanya, kecuali yang diperoleh dari warisan atau hibah. Begitu juga istri tidak menjadi pemilik penuh dari harta yang diperoleh dari hasil usahanya dalam perkawinan. Dalam hal ini timbul pertanyaan dari harta mana suami melaksanakan kewajiban memberi nafkah kepad istri dan anaknya. Karena tidak semua suami yang mempunyai harta bawaan atau harta warisan dan hibah.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. dan KHI Pasal 80 Ayat (4) : sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri, Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, Biaya pendidikan. Pasal ini tidak ada penjelasannya, bagaimana pelaksanaannya nafkah bagi keluarga yang menngabungkan hartanya menjadi harta bersama. Dan apa bedanya dengan keluarga memisahkan harta suami-istri menjadi harta pribadi. Seharusnya ada perbedaan tentang kewajiban pelaksanaan nafkah dalam memenuhi kebutuhan rumahtangganya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan pranata sosial yang berkaitan dengan yuridis formal. Jenis yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang dipakai kualitatif normatif, dengan melakukan penelitian bersifat *content analisis*. Sumberdata merukan data sekunder, dibagi menjadi bahan hukum primer berupa peraturan tentang harta bersama yang bersumber dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI. Bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian, jurnal ,buku fikih, tafsir dan buku lainnya, Bahan hukum tersier kamus ensiklopedi dan lain-lain. Data yang diperoleh dari sumber- sumber penelitian diteliti dengan memperhatikan alasan-alasan yang digunakan, kemudian didokumentasikan dalam bentuk catatan-catatan dan dianalisis dengan mentelaah naskah untuk mengambil kesimpulan. Temuan yang diperoleh melalui penelitian, dikomunikasikan melalui bahasa ilmiah. untuk menafsirkan dan melakukan keterkaitan konsep, serta pada akhirnya membangun pemahaman-pemahaman baru tentang masalah yang diteliti.

PERMASALAHAN

Bila dikaitkan ketentuan harta bersama dalam perkawinan dengan kewajiban nafkah oleh suami kepada istri dan anaknya, timbul pertanyaan bagaimana pelaksanaannya nafkah bagi keluarga yang menngabungkan hartanya menjadi harta bersama. Dan apa bedanya dengan keluarga memisahkan harta suami-istri menjadi harta pribadi.

PEMBAHASAN

Harta Kekayaan dalam Perkawinan

Menganalisis kitab fikih tidak dikenal adanya percampuran harta suami istri setelah berlangsungnya perkawinan. Suami memiliki hartanya sendiri berupa harta bawaannya atau harta yang diperolehnya dalam perkawinan bisa bersumber dari warisan, hibah dan hasil usahanya sendiri. Dan begitu juga istri memiliki hartanya sendiri berupa harta bawaannya atau harta yang diperolehnya dalam perkawinan bisa bersumber dari warisan, hibah dan hasil usahanya sendiri. (Wahbah Zuhaili, 1989, Amir Syarifuddin, 2006).

Ketentuan harta bersama dalam perkawinan merupakan fikih kontemporer di Indonesia. Harta bersama dalam perkawinan mulanya bersumber dari adat istiadat ('urf) masyarakat suatu negeri yang tidak memisahkan hak milik suami dan istri. Pencarian suami bercampur baur dengan hasil pencarian istri. Dalam rumah tangga seperti ini, rasa kebersamaan lebih menonjol. Harta bersama dalam perkawinan mulanya bersumber dari adat istiadat ('urf) masyarakat suatu negeri yang tidak memisahkan hak milik suami - istri. Pencarian suami bercampur baur dengan hasil pencarian istri. Dalam rumah tangga seperti ini, rasa kebersamaan lebih menonjol. Harta seperti ini dalam masyarakat di Indonesia lebih dikenal dengan Gana-Gini. Di Aceh dinamakan dengan heureta sihaurekat, di Minangkabau dikenal dengan nama harta suarang, di Sunda diberi nama guna kaya, atau tumpang kaya, (di Kabupaten Sumedang) atau sarikat (di Kabupaten Kuningan), di Jakarta dinamakan harta pencaharian, di Jawa dinamakan barang gana atau gono gini, di Bali disebut drube gabro, di Kalimantan disebut barang perpantangan, di Sulawesi (Bugis dan Makasar) dikenal dengan barang cakara, dan di Madura dikenal dengan nama ghuna-ghana. (Satria Efendi, 2004: 60)

Di Indonesia, adat kebiasaan seperti di atas sudah menjadi lebih kuat, karena telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur harta kekayaan suami istri dalam pasal 35 (1), harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. (2), harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawa penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Kompilasi Hukum Islam pasal 1 f menjelaskan harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Kompilasi Hukum Islam memberi penjelasan tentang harta kekayaan dalam perkawinan, Pasal 85 menyebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Pasal 86 ayat (1), pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Ayat (2), harta istri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya. Demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Pasal 87, harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) menjelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 f menyebutkan harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.

Proses terjadi harta bersama tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Bila dipahami dari definisi harta bersama yang dijelaskan dalam Undang-

Undang Perkawinan seolah-olah harta bersama terjadi secara otomatis (*ijbari*) setelah akad nikah dilakukan. Dalam hukum adat di Indonesia suami dan istri tidak memisahkan secara jelas harta masing-masing dan tidak juga bercampur atau menyatu keseluruhan harta dalam perkawinan, jika dikaitkan dengan prakteknya dalam masyarakat adat tertentu, maka harta pencarian yang diperoleh suami-istri sebagai milik bersama dalam masa perkawinan. Dasar modal harta diperoleh suami-istri bawaan masing-masing dan harta penghasilan masing-masing sebelum perkawinan. Setelah perkawinan suami-istri membentuk dan membangun rumah tangga bahagia dan kekal, mereka berusaha mencari rezeki bersama-sama sehingga dari harta yang diperoleh sehari-hari akan dapat terwujud harta kekayaan sebagai hasil pencarian bersama, yang disebut harta pencarian, tanpa memperdulikan apakah suami yang bekerja aktif dan istri mengurus rumah dan anak-anak. Harta pencarian itu, disebut harta bersama suami-istri. Harta yang diperoleh suami dan istri dari usahanya menjadi harta bersama, baik mereka bekerja bersama-sama atau hanya suami saja yang bekerja. Apabila mereka telah mengikatkan diri dalam perkawinan sebagai suami-istri, maka semuanya menjadi bersatu, baik dalam bentuk harta maupun terhadap anak-anak mereka. Bila perkawinan telah terjadi, dengan adanya ijab dan kabul serta terpenuhinya persyaratan dalam perkawinan seperti adanya wali, saksi, mahar dan walimah, maka harta yang diperoleh dalam perkawinan menjadi harta bersama. Suami-istri masing-masing-dalam perkawinan mempunyai harta yang dibawa dan diperoleh sebelum melakukan akad perkawinan. Suami atau istri yang telah melakukan perkawinan mempunyai harta yang diperoleh selama perkawinan yang disebut harta bersama. Meski harta bersama tersebut hanya suami yang bekerja dengan berbagai usahanya sedangkan istri berada di rumah dengan tidak mencari nafkah melainkan hanya mengurus rumah tangga dan anak-anaknya.

Nilai-nilai hukum baru dalam harta bersama yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 35 ayat 1, yang diperkuat dalam Kompilasi Hukum Islam dikemukakan bahwa harta bersama suami istri itu adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung. Melihat awal sejarah diberlakukan konsep harta bersama, dapat dipahami bahwa ide untuk memunculkan pelembagaan harta bersama adalah merupakan wujud perlindungan sekaligus pengakuan terhadap hak-hak istri dalam rumah tangganya. Pada keadaan tertentu terjadi masalah dalam rumah tangga seseorang, istri tidak perlu cemas memikirkan kepentingannya secara materil sebagai bekal memenuhi kebutuhan dasarnya seperti terjadi perceraian. Pemicu ditetapkan harta bersama dalam perkawinan antara lain kondisi masyarakat pada awalnya yang berfungsi bekerja mencari nafkah adalah suami, maka pemilik mutlak harta yang diperoleh adalah suami. Sedangkan istri tidak mempunyai saham atas terkumpulnya harta dalam perkawinan. Istri bekerja dalam rumah yang tidak menghasilkan uang, tetapi membantu suami untuk menyiapkan dan mengatur keperluan kehidupan dalam rumah tangga. Saat terjadi pisah rumah atau putusnya perkawinan, istri bisa saja tidak punya sesuatu apapun sebagai bekal untuk hidup. Sebagai posisi jaga-jaga mengantisipasi kelalaian suami masalah nafkah dan kurang perhatian suami secara materil terhadap istri dan anak-anaknya, maka ditetapkanlah adanya harta bersama. Bila terjadi putus perkawinan, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing dan atau dibagi dua, sebagian untuk suami dan sebagian lagi untuk istri. Eksistensi harta bersama sangat terasa manfaatnya bagi masyarakat dalam sistem kekerabatan patriarkhi, seperti adat masyarakat Sumatera Utara (batak) bila suami menceraikan istri atau suami meninggal dunia, maka istrinya tidak berhak tinggal di rumah suami, dan tidak berhak dalam harta dan warisan dari suaminya. Dan di sisi lain, budaya adat patriarkhi, tidak memberikan bahagian warisan untuk anak perempuan. Tujuan menetapkan ketentuan harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam adalah untuk unifikasi, kodifikasi dan tertib hukum, serta pemikiran untuk melindungi hak-hak istri dalam harta perkawinan

Pengaruh Harta Mersama Terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah

Harta adalah ibarat pedang bermata dua bisa berfungsi menghubungkan silaturahmi dan bisa pula memutuskan silaturahmi. Pada dasarnya suami-istri yang sama-sama punya penghasilan dari pekerjaannya haruslah membuat ketentuan tentang kedudukan hartanya, apakah menjadikan hartanya milik pribadinya masing-masing, maka suami tentu punya kewajiban menafkahi istri dan anak-anaknya. Hal seperti ini adalah konsep dasar pengaturan dalam fikih klasik, pemilikan harta antara suami istri itu secara *ijbari* adalah milik pribadi dan tidak ada pengabungan harta secara otomatis, pengabungan harta terjadi secara *ikhtiari* yakni suami istri melakukan perjanjian perkawinan atau perserikatan.

Penetapan harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbeda dengan ketentuan hukum Islam. Dalam UU NO: 1 tahun 1974 pasal 35 dinyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, hal ini juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1f. Berdasarkan Kedua pasal tersebut di atas, terdapat indikasi yang menyatakan bahwa harta bersama itu terbentuk setelah adanya perkawinan dan harta yang diperoleh selama perkawinan tersebut dinamakan dengan harta bersama. Penegasan seperti ini antra lain dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Nopember 1976 No: 1448 K/ sip/1974. Putusan ini menegaskan “ sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut dibagi sama rata antara bekas suami-istri.”(Yahya harahap,2003:272). Putusan ini menegaskan bahwa harta bersama terbentuk dengan sendirinya setelah perkawinan dilangsungkan. pembentukan harta bersama dimulai sejak akad perkawinan dilakukan sampai ikatan perkawinan bubar (putus). keinginan untuk memisahkan harta dilakukan bila ada perjanjian perkawinan untuk memisahkan harta bersama sebagaimana diatur dalam UU NO:1 tahun 1974 pasal 26 dan KHI pasal 47, artinya harta bersama dalam perkawinan terjadi secara *ijbari* (otomatis) dan pemisahannya secara *ikhtiari* yakni dengan melakukan perjanjian perkawinan.

Berdasarkan keterangan di atas, dalam harta bersama terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar harta tersebut bisa dikatakan harta bersama, di antara unsur tersebut adalah :

1. Harta yang diperoleh selama perkawinan oleh suami-istri, tidak ditentukan atas nama siapa
2. Tidak merupakan harta bawaan dari masing-masing suami-istri
3. Tidak memperhitungkan sumbernya, apakah dari penghasilan suami saja, istri saja atau bersumber dari penghasilan suami-istri
4. Harta tersebut tidak berupa harta warisan, hadiah, hibah dan sedekah untuk masing-masing pihak
5. Harta bersama berakhir apabila terjadi putusnya perkawinan secara formal menurut hukum.

Suami- istri yang mengabungkan hartanya menjadi harta bersama dengan kerelaan, maka kebutuhan keluarga haruslah diambilkan dari harta bersama itu. Artinya suami tidak dapat dituntut lagi memberi nafkah pada keluarganya. Berdasarkan pengertian harta bersama di atas, dapat dipahami bahwa suami tidak lagi memiliki secara pribadi harta yang diperoleh dari hasil usahanya, kecuali harta yang diperoleh dari warisan atau hibah. Begitu juga istri tidak menjadi pemilik penuh dari harta yang diperoleh dari hasil usahanya dalam perkawinan. Dalam hal ini timbul pertanyaan dari harta mana suami melaksanakan kewajiban memberi nafkah kepada istri dan anaknya. Karena tidak semua suami yang mempunyai harta bawaan atau harta warisan dan hibah.

Kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku dalam fikih didasarkan kepada prinsip pemisahan antara harta suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah mencari reski. Rezki yang telah diperolehnya itu, menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya istri bukan mencari reski, untuk memenuhi keperluannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah. Oleh karena itu, kewajiban nafkah tidak relevan dalam komunitas yang mengikuti prinsip pengabungan harta dalam perkawinan

Konsep harta bersama ini adalah merupakan pembaruan fikih yang disebut fikih kontemporer, maka hal ini punya implikasi terhadap kewajiban suami menafkahi istri dan anak-anaknya. Adanya harta bersama dalam perkawinan mempengaruhi pola keluarga yang telah ditetapkan dalam fikih klasik yang mengatur harta menjadi milik pribadi, menganut paham pemisahan harta secara individual bukan kolektif. Suami –istri yang mengabungkan hartanya menjadi harta bersama dengan dasar kerelaan, maka akan berakibat harta menjadi bercampur dan kebutuhan keluarga tentunya diambilkan dari harta bersama ini. Bila terjadi perceraian maka harta bersama dapat dibagi dua atau sesuai dengan saham yang dominan dari jumlah harta yang diperoleh.

Perkembangan pemikiran tentang masalah harta bersama dalam perkawinan, menolak atau menerima, tarik menarik dalam masalah ini sering dikaitkan dengan persoalan istri apakah ada sahamnya buat terkumpulnya harta bersama atau tidak. Untuk lebih jelasnya dikemukakan dulu sumber harta dalam perkawinan ada yang bersumber dari hasil usaha suami saja, atau bersumber dari hasil usaha istri saja atau bersumber dari hasil usaha suami-istri berdua. Harta yang tepat dijadikan harta bersama adalah dari harta suami-istri yang sama-sama punya penghasilan.

Hubungan hukum kekeluargaan dan hubungan hukum kekayaan terjalin sangat erat, sehingga keduanya dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Hubungan hukum kekeluargaan menentukan hubungan hukum kekayaan, dan hukum harta dalam perkawinan merupakan hukum kekayaan keluarga.

Kenyataan dalam kehidupan keseharian masyarakat sekarang ini, suami-istri baik secara langsung maupun tidak, mempunyai andil dalam mencari dan mengumpulkan harta untuk kebutuhan keluarga. Dalam hal ini dipertanyakan harta yang mereka peroleh itu milik siapa secara hukum. Bila terjadi sengketa dengan pihak ketiga, siapa yang harus bertanggungjawab terhadap harta itu. Bila terjadi denda akibat kelalaian seseorang dalam melaksanakan tugasnya, siapa yang bertanggungjawab mengurus denda tersebut.

Hukum Islam tidak mengenal adanya harta bersama suami-istri dalam perkawinan. Karenanya hal ini tidak dibicarakan secara khusus dalam kitab fikih. Hal ini sejalan dengan azas pemilikan harta secara individual. Atas dasar azas ini suami wajib memberi nafkah dalam bentuk biaya hidup dengan segala kelengkapan untuk anak dan istrinya dari harta suami sendiri. (Abdul Azis Dahlan, 1997: 389) Membaca Undang-Undang Perkawinan Pasal 35 dan 36, dapat dipahami bahwa Undang-Undang ini mengakui adanya harta bersama dan harta pribadi suami-istri dalam perkawinan. Hal ini juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 bahwa ada pemisahan antara harta bersama dengan harta pribadi

Kompilasi Hukum Islam Pasal 86 ayat (1) memperjelas bahwa pada dasarnya tidak ada pencampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Hal ini berarti harta pribadi baik dalam bentuk harta bawaan (harta yang ada sebelum perkawinan) maupun harta milik pribadi yang ada setelah perkawinan seperti yang diperoleh melalui hadiah, hibah dan warisan, boleh digabungkan menjadi harta bersama dengan melakukan perjanjian perkawinan untuk mengabungkan harta pribadi menjadi harta bersama.

Proses terjadi harta bersama tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Bila dipahami dari definisi harta bersama yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan seolah-olah harta bersama terjadi secara *ijbari* (otomatis) setelah akad nikah dilakukan. Hal ini adalah apa yang dilaksanakan masyarakat barat memakai hukum perdata (B W), setelah perkawinan terjadi maka otomatis harta bercampur menjadi satu, bila terjadi perceraian maka harta dibagi dua

Berdasarkan hukum adat di Indonesia suami dan istri tidak memisahkan secara jelas harta masing-masing dan tidak juga bercampur atau menyatu keseluruhannya. Mereka bekerja sama dan hasil

pencarian mereka dimanfaatkan bersama untuk keperluan keluarga seperti untuk makan, pakaian dan untuk membangun rumah.

Manakalah ditelaah pengertian harta bersama yang diungkapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 f, pasal ini hanya mengungkapkan pengertian harta bersama, tidak ada kejelasan bagaimana poses terjadinya harta bersama itu. Kompilasi Hukum Islam Pasal 86 telah menjelaskan bahwa tidak ada percampuran harta pribadi suami dan harta istri karena perkawinan. Bila dipahami pasal ini tentunya kalau mau dijadikan harta bersama yang dalam KHI diistilahkan syirkah maka harus jelas bentuk akadnya dan jelas proses terjadinya perpindahan harta pribadi menjadi harta bersama, terutama harta hasil usaha pencarian istri yang suami tidak ada haknya dalam harta itu, kecuali harta hasil pencarian suami, istri mempunyai hak dalam harta itu yang menjadi kewajiban suami menafkahi istrinya dari harta hasil usahanya.

Setiap harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan tanpa mempersoalkan siapa yang mencarinya di antara suami-istri, maka itu adalah harta bersama. Istri dapat dikatakan memberi saham terhadap harta bersama dengan melakukan tugas domestik, istri sebagai ibu rumah tangga yang melaksanakan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, melayani suami, mengurus dan mendidik anak-anak, serta mengatur rumah tangganya, juga memberikan kontribusi yang sangat penting terwujudnya harta bersama. Kontribusi peran ganda istri sangat signifikan kaitannya dengan harta bersama.

Konsekwensi adanya pengabungan harta pencarian suami-istri menjadi harta bersama, maka selayaknyalah harta bersama merupakan sumber untuk dapat digunakan memenuhi kebutuhan keluarga, baik berupa kebutuhan pokok keluarga yakni istri dan anak-anak serta orang yang menetap di rumah keluarga tersebut. Kebutuhan tersebut berupa kebutuhan makan, minum, pakaian, biaya pendidikan, biaya pengobatan, perumahan beserta perabotannya, sebagaimana yang dijelaskan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80. Hal ini dapat juga dipahami dari apa yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 93 ayat (2) yang menyatakan pertanggungjawaban hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama. Ayat (3) bila harta bersama tidak mencukupi dibebankan kepada harta suami. ayat (4) bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta istri.

Menganalisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 93 di atas dapat dipahami bahwa kebutuhan nafkah merupakan kepentingan keluarga, diambilkan dari harta bersama. Bila harta bersama tidak mencukupi baru diambilkan dari harta pribadi suami. manakala harta pribadi suami tidak ada, boleh diambilkan dari harta istri. Suami tidak dapat dituntut untuk memberikan nafkah dari hartanya sendiri, karena harta pencariannya sudah bercampur menyatu dengan harta istri. Inilah akibat yang ditimbulkan adanya harta bersama yang ditetapkan berdasarkan ijtihad ulama di Indonesia.

Konsep harta bersama memberi pengaruh terhadap kewajiban suami memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Berbeda dengan ketentuan pemisahan harta pencarian suami-istri dalam keluarga, maka suami berkewajiban memberi nafkah pada istri dan anaknya yang diambilkan dari harta pribadi suami. Adanya harta bersama dalam perkawinan, tentunya suami tidak punya harta pribadi lagi dari harta pencariannya. Maka bila suami dengan istri dan anak-anaknya makan bersama, tinggal serumah dan membeli pakaian bersama dari harta bersama dalam perkawinan, sudah dapat dikatakan nafkah keluarga sudah terpenuhi. Artinya kewajiban nafkah sudah terlaksana.

Penulis berpendapat apabila pasal 34 ayat (1) dari Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) dikaitkan dengan harta bersama, maka dalam pelaksanaannya harus ada penjelasan bagaimana suami menjalankan apa yang diamanahkan aturan di atas tentang kewajiban suami memberi nafkah pada istri dan anak-anaknya. Agar tidak terdapat kekaburan (abu-abu) dalam pelaksanaan kewajiban nafkah oleh suami terhadap istrinya.

KESIMPULAN

penelitian menjelaskan bahwa suami istri yang menggabungkan hartanya menjadi harta bersama dengan kerelaan, maka kebutuhan keluarga haruslah diambilkan dari harta bersama. Artinya suami tidak dapat dituntut lagi memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, Seharusnya ada penjelasan dalam pelaksanaan ketentuan kewajiban suami memberi nafkah pada istri dan anaknya sebagai implikasi ketentuan harta bersama

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdurrahman, (1992) *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta Akademika Pressindo
- Arso Sosroatmojo dan A Wasit Aulawi, (1978), *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang
- Bushar, Muhammad, 1998, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta: PT Pradnya Paramita
- Besse Sugiswati, *Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Lslam*, kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat, Jurnal perspektif Volume XIX No. 3 Tahun 2014 Edisi September
- Efend, Satria, 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana,
- Evi Djuniarti, (2017) *hukum harta bersama ditinjau dari perspektif undang-undang perkawinan dan kuh perdata*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 17 No. 4 , Desember
- Herawati, Andi. (2011) *Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia*, Vol. 8 No. 2 Desember 2011:321-340, Hunafa: Jurnal Studia Islamika. Makassar.
- Ibnu Ruysd, (tt), *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid Beirut*: Dar Ihya'al-Kitab 'Arabiyah,
- Luthfi, Amir, 2011, *Hukum & Perubahan Struktur Kekuasaan Pelaksanaan Hukum Islam dalam Kesultanan Melayu Siak 1901-1942*, Pekan Baru: Suska Press
- Kamello, Tan dan Lisa Andriati Syarifah, *Hukum Harta Warisan Menurut Hukum Perkawinan*, Medan, USU, 2016
- Rasyid, As'ad, Abd.,(2010). *Gono-Gini dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Pengadilan Agama. Oktober
- Syarifuddin, Amir, (2009) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Syarbaini, Muhammad al-Khatib, (1997), *Mugni al-Muhtaj*, Beirut: Dar al-Ma`rifa
- Sayid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah*, (Beirut: Dar al- Fikr, 1983),
- Thalib, Sayuti, (1986,) *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI-Press
- Zuhaily, Wahbah,(1989), *Fiqh al-Islamy wa Adilatuhu*, Damaskus, Da al-Fikr